

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**ESELON III**  
**SEKRETARIS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Saruddin, S.E.

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ikhwani Habibi Daulay, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Kota Medan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

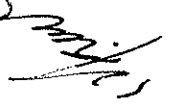
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Inspektur



**Ikhwani Habibi Daulay, S.H., M.H.**  
**NIP. 19620107 198408 1 001**

Medan, Pihak Pertama  
Sekretaris



**H. Saruddin, S.E.**  
**NIP. 19640703 199003 1 003**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**


**ESELON III  
SEKRETARIS**

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi) x 100 % (Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	10%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	(Jumlah PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju <u>WBK/WBBM</u> ) x 100 % (Jumlah PD)	- Laporan hasil evaluasi - Rekapitulasi PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi SAKIP	(Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi) x 100 % (Jumlah PD yang dievaluasi)	Laporan hasil evaluasi	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah direviu sesuai pedoman reviu laporan keuangan	(Jumlah PD yang telah direviu sesuai <u>pedoman reviu</u> ) x 100 % (Jumlah PD yang direviu)	Laporan hasil reviu	100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan	(Jumlah Laporan <u>Capaian Kinerja dan Keuangan</u> x 100 % (Kewajiban Pelaporan)	Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, LPPD/LKPJ, Renja Inspektorat	100%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase rekomendasi yang harus ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP b. Eksternal	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP b. eksternal) x 100 % (Jumlah rekomendasi APIP dan Eksternal)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-Pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - Hasil pemantauan TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara	60% 60%


Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang tersertifikasi sesuai kompetensi	(Jumlah pengawas internal yang tersertifikasi sesuai kompetensi) x 100 % (Jumlah APIP yang tersertifikasi)	Laporan keikutsertaan bimtek/diklat tahunan	90%
Program pelayanan administrasi perkantoran	Survei kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	(Jumlah nilai persepsi) x 100 % (Jumlah nilai unsur)	Laporan survei kepuasan	75%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Survei kepuasan pegawai atas sarana dan prasarana aparatur	(Jumlah nilai persepsi) x 100 % (Jumlah nilai unsur)	Laporan survei kepuasan	75%
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin berpakaian dinas dalam bekerja	(Jumlah pegawai disiplin berpakaian dinas) x 100 % (Jumlah seluruh pegawai)	Laporan pemantauan	95%

Medan,

Pihak Kedua  
Inspektur

  
Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.  
NIP. 19620107 198408 1 001

Pihak Pertama  
Sekretaris

  
H. Saruddin, S.E.  
NIP. 19640703 199003 1 003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

### ESELON III

#### INSPEKTUR PEMBANTU I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Asli, M.Si.

Jabatan : Inspektur Pembantu I Inspektorat Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Kota Medan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

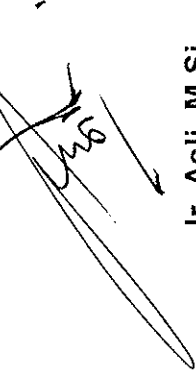
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Inspektur



Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.  
NIP. 19620107 198408 1 001

Medan,  
Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu I



Ir. Asli, M.Si.  
NIP. 19631024 198503 1 005

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

## ESELON III

## INSPEKTUR PEMBANTU I

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u> ) x 100 % (Jumlah temuan pengawas internal)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-Pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - hasil pemantauan TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara	10%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u> ) x 100 % (Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan PKPT	(Jumlah Kegiatan Pengawasan <u>PKPT</u> x 100 % (Pelaksanaan PKPT)	- Laporan hasil evaluasi/audit/reviu	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi SAKIP	(Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi) x 100 % (Jumlah PD yang dievaluasi)	Laporan hasil evaluasi	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan yang berindikasi efektif, efisien dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah temuan yang berindikasi efektif, <u>efisien, dan ekonomis</u> x 100 % Jumlah temuan	Laporan hasil pemeriksaan	80%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP	(Jumlah pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas <u>pengawas internal</u> ) x 100 % (Jumlah pernyataan)	Laporan assessment BPKP RI	100%

Medan,

Pihak Kedua  
InspekturIkhwani Habibi Daulay, S.H., M.H.  
NIP. 19620107 198408 1 001Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu IIr. Asli, M.Si.  
NIP. 19631024 198503 1 005

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

### ESELON III

#### INSPEKTUR PEMBANTU II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Terulin, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Pembantu II Inspektorat Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Kota Medan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Inspektur



Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.  
NIP. 19620107 198408 1 001

Medan,

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu II



Drs. Terulin, S.H., M.H.  
NIP. 19640916 198503 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**ESELON III**  
**INSPEKTUR PEMBANTU II**

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u> ) x 100 % (Jumlah temuan pengawas internal)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-Pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - hasil pemantauan TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara	10%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u> ) x 100 % (Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan PKPT	(Jumlah Kegiatan Pengawasan PKPT x 100 % (Pelaksanaan PKPT)	- Laporan hasil evaluasi/audit/reviu	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi SAKIP	(Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi) x 100 % (Jumlah PD yang dievaluasi)	Laporan hasil evaluasi	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan yang berindikasi efektif, efisien dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah temuan yang berindikasi efektif, <u>efisien, dan ekonomis</u> x 100 % Jumlah temuan	Laporan hasil pemeriksaan	80%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP	(Jumlah pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas <u>pengawas internal</u> ) x 100 % (Jumlah pernyataan)	Laporan assessment BPKP RI	100%

Medan,

Pihak Kedua  
Inspektur

Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.  
NIP. 19620107 198408 1 001

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu II

Drs. Terulin, S.H., M.H.  
NIP. 19640916 198503 1\*005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**ESELON III**  
**INSPEKTUR PEMBANTU III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adil Maulana Siregar, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Kota Medan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Inspektur Kota Medan



Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.  
NIP. 19620107 198408 1 001

Medan,  
Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu III



Adil Maulana Siregar, S.Sos., M.Si  
NIP.19640407 199003 1 005



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

## ESELON III

## INSPEKTUR PEMBANTU III

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u> ) x 100 % (Jumlah temuan pengawas internal)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-Pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - hasil pemantauan TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara	10%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang <u>berindikasi tindak pidana korupsi</u> ) x 100 % (Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan PKPT	(Jumlah Kegiatan Pengawasan <u>PKPT</u> x 100 % (Pelaksanaan PKPT)	- Laporan hasil evaluasi/audit/reviu	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi SAKIP	(Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi) x 100 % (Jumlah PD yang dievaluasi)	Laporan hasil evaluasi	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan yang berindikasi efektif, efisien dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah temuan yang berindikasi efektif, <u>efisien, dan ekonomis</u> x 100 % Jumlah temuan	Laporan hasil pemeriksaan	80%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas APiP	(Jumlah pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas <u>pengawas internal</u> ) x 100 % (Jumlah pernyataan)	Laporan assessment BPKP RI	100%

Pihak Kedua  
Inspektur

Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.  
NIP. 19620107 198408 1 001

Medan,

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu III

Adil Maulana Siregar, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19640407 199003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
ESELON III  
INSPEKTUR PEMBANTU IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MaslenSimarmata, SH

Jabatan : Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama



Nama : Ikhwan HabibiDaulay, S.H., M.H

Jabatan : Inspektur Kota Medan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

<p>Pihak Kedua Inspektur Kota Medan</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Ikhwan HabibiDaulay, S.H., M.H. NIP. 19620107 198408 1 001</p>	<p>Medan,</p> <p>Pihak Pertama Inspektur Pembantu IV</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Maslen Simarmata, SH. NIP.19660727 199603 1 002</p>
---	--

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
ESELON III  
INSPEKTUR PEMBANTU IV

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u> ) x 100 % (Jumlah temuan pengawas internal)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-Pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - hasil pemantauan TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara	10%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u> ) x 100 % (Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan PKPT	(Jumlah Kegiatan Pengawasan <u>PKPT</u> x 100 % (Pelaksanaan PKPT)	- Laporan hasil evaluasi/audit/reviu	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi SAKIP	(Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi) x 100 % (Jumlah PD yang dievaluasi)	Laporan hasil evaluasi	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan yang berindikasi efektif, efisien dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah temuan yang berindikasi efektif, <u>efisien, dan ekonomis</u> x 100 % Jumlah temuan	Laporan hasil pemeriksaan	80%

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP	(Jumlah pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas <u>pengawas internal</u> ) x 100 % (Jumlah pernyataan)	Laporan assessment BPKP RI	100%
---	--	--	----------------------------	------

Pihak Kedua  
Inspektur



Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.  
NIP. 19620107 198408 1 001

Medan,

Pihak Pertama  
Inspektur Pembantu IV



Maslen Simarmata, SH.  
NIP. 19660727 199603 1 002